

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	REPUBLIKA	3	19-08-2002

Subsidi BBM 2003 Dicabut

Kebijakan itu dinilai semakin membebani masyarakat kurang mampu.

JAKARTA — Harga bahan bakar minyak (BBM) akan mengalami kenaikan pesat seiring dengan dicabutnya semua subsidi BBM pada RAPBN 2003. Kenaikan harga itu berlaku untuk solar, minyak tanah untuk industri, minyak diesel, dan minyak bakar.

Dalam keterangannya di depan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan pada 2003 mendatang harga seluruh jenis BBM dalam negeri akan menjadi 100 persen harga pasar. Kecuali, kata presiden, minyak tanah bagi konsumen ru-

mah tangga.

Dalam RAPBN 2003, pemerintah menurunkan secara drastis subsidi BBM dari Rp 30,4 triliun menjadi hanya Rp 13,6 triliun atau 44,7 persen. Konsekuensi dari kebijakan tersebut akan terjadi kenaikan harga BBM di tahun 2003, terutama untuk BBM yang pada saat ini masih bersubsidi.

Jenis BBM yang masih disubsidi adalah solar, minyak diesel, minyak bakar, dan minyak tanah industri sebesar 25 persen harga pasar. Sedangkan minyak tanah rumah tangga, subsidiya lebih dari 65 persen, mengingat harganya hanya Rp 600 per liter. Padahal harga pasarnya mencapai Rp 1.720 per liter.

Jika dicabut subsidiya, diperkirakan harga solar, minyak diesel, dan minyak bakar di SPBU (untuk transportasi dan usaha kecil) akan mengalami kenaikan

Rp 350 sampai Rp 450 per liter.

Pada saat ini, harga solar yang dijual di Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum (SPBU) sebesar Rp 1.325 per liter. Harga itu merupakan 75 persen harga pasar. Jika subsidi dicabut, harganya mencapai Rp 1.760 per liter.

Perhitungan 75 persen harga pasar minyak diesel dan minyak bakar saat ini masing-masing sebesar Rp 1.300 dan Rp 1.090 per liter. Sementara, untuk 100 persen pasar (non subsidi) masing-masing Rp 1.730 dan Rp 1.450 per liter.

Sedangkan harga premium, karena pada saat ini sudah tidak lagi disubsidi atau sudah berlaku 100 persen harga pasar, diperkirakan harganya tidak akan banyak berubah. Harga premium di pasaran untuk periode Agustus 2002, ditetapkan sebesar Rp 1.735,00.

Untuk kebijakan tarif dasar

listrik (TDL), pemerintah merencanakan subsidi sebesar Rp 4,1 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini hampir sama dengan subsidi listrik tahun 2002.

Namun demikian, pemerintah tetap melanjutkan pengurangan subsidi listrik melalui penyesuaian TDL secara bertahap rata-rata enam persen setiap triwulan.

Pemberian subsidi listrik akan lebih diprioritaskan bagi pelanggan sosial, rumah tangga, bisnis, dan industri dengan penggunaan daya dibawah 900 watt.

Dengan mengurangi subsidi listrik diharapkan pemerintah bisa menghemat Rp 1,1 triliun. Namun demikian dari hasil penghematan anggaran subsidi energi itu, akan digunakan secara langsung membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu.

Khususnya, mereka yang terkena dampak penyesuaian harga BBM dan TDL, melalui penyedia-

an dana kompensasi sosial.

Anggota Komisi VIII DPR RI Priyo Budi Santoso menyayangkan rencana pemerintah untuk menghapus subsidi BBM pada 2003 — kecuali pada bahan bakar minyak tanah.

Priyo beralasan hal itu jelas akan sangat membebani masyarakat.

"Saya sama sekali tidak senang dengan penghapusan subsidi. Ini kebijakan yang sangat tidak populis," tegas anggota Dewan dari fraksi Golkar itu.

Apalagi, katanya, tarif dasar listrik pun terus mengalami kenaikan enam persen secara bertahap setiap tri wulannya.

Dikatakan Priyo, beban yang sedemikian berat ini ditakutkan dapat menyebabkan inflasi semakin besar. Bahkan melebihi target pemerintah yang hanya mencapai delapan persen.

■ erd/ant